



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Peran World Trade Organization dalam Penyelesaian
Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di
India

Skripsi

Oleh

Rengga Kusuma Wardhana

2013330129

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Peran World Trade Organization dalam Penyelesaian
Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di

India

Skripsi

Oleh

Rengga Kusuma Wardhana

2013330129

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Rengga Kusuma Wardhana
NPM : 2013330129
Judul Skripsi : Peran *World Trade Organization* dalam Penyelesaian Sengketa
Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 18 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. : _____

Sekretaris

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. : _____

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rengga Kusuma Wardhana

NPM : 2012330129

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran *World Trade Organization* dalam Penyelesaian Sengketa
Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di India

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Desember 2017

Rengga Kusuma Wardhana

ABSTRAK

Nama : Rengga Kusuma Wardhana
NPM : 2013330129
Judul : Peran *World Trade Organization* dalam Penyelesaian Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di India

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana proses penyelesaian sengketa antara India dan Tiongkok menyangkut tuduhan dumping dalam produk bahan baku otomotif pada periode 2010-2015 dilihat dari perspektif rezim perdagangan bebas yaitu *World Trade Organization* (WTO). Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses perundingan penyelesaian sengketa yang terjadi antara India dan Tiongkok terkait masalah dumping di *Dispute Settlement Body*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan tipe deskriptif dalam menyajikan data. Teknik pengumpulan data meliputi buku, jurnal, laporan dari organisasi internasional, surat kabar, dan majalah dari website terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memandang konflik perdagangan bahan baku otomotif antara India dan Tiongkok melibatkan peran rezim perdagangan bebas. Hasil dari penyelesaian konflik tersebut menunjukkan bahwa salah satu aktor negara melakukan tindakan proteksionisme. Hal tersebut membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap aturan dalam perdagangan bebas.

Kata Kunci: India, Tiongkok, WTO, Bahan Baku Otomotif, Dumping

ABSTRACT

Name : Rengga Kusuma Wardhana
NPM : 2013330129
Title : Role of World Trade Organization in Settlement of Trade Dispute of Automotive Parts Product from China in India

This research was conducted to answer the research question which examined the allegation addressed by India on dumping of automotive parts product undertaken by China in 2010-2015 through free trade regimes, World Trade Organization. The research also analyze the process on how the dispute between the two countries resolved by Dispute Settlement Body in WTO. The research method used was qualitative method. This research used descriptive type in presenting data. The data was collected by doing the study of literature through books, journals, international organization's reports, newspapers, and magazines from related websites. This study concluded that settling automotive parts disputes among India and China involved the role of free trade regimes. The result of the dispute settlements showed that one of the countries that involved in the dispute practiced protectionism in their trade which resulted in violation of agreement in free trade.

Keyword: India, China, WTO, Automotive Parts, Dumping

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan izinnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran *World Trade Organization* dalam Penyelesaian Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif Tiongkok di India”. Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan Strata-1 program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunannya, tidak sedikit hambatan yang dilalui. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang tiada hentinya membantu dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terdapat berbagai kekurangan pada beberapa aspek, seperti sistematika penulisan, pengolahan hingga penyajian data, yang menjadi celah bagi pembaca dalam memberikan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Disamping itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi perkembangan studi hubungan internasional, khususnya pada bidang ekonomi internasional.

Bandung, 10 Desember 2017

Rengga Kusuma Wardhana

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kehendaknya, Penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi sesuai target. Selanjutnya, ucapan teirmakasih penulis ucapkan untuk dosen pembimbing, kepada **Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.** yang senantiasa membimbing dan memberi arahan terhadap proses penyusunan penelitian skripsi ini. Penulis turut mengucapkan terimakasih kepada **Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.** dan **Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.** yang sudah berkenan menjadi penguji skripsi.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan untuk **Papa, Mama, Abah, Enin, dan seluruh Keluarga Tercinta** yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan kelancaran proses penyusunan penelitian ini. Kepada **Diko, Zico, Andrian, Angga, dan Teman-Teman Seperjuangan di HI Unpar**, yang saling memberi dukungan moral sehingga menumbuhkan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Kepada **Alvin, Abimael, Rangga, Mudi, Kadek, Jeremy, Hanna, Gisca, Edu, Patrik, dan Teman-Teman Paduan Suara Mahasiswa Unpar** yang telah menemani pada masa-masa kepenatan kuliah untuk dapat menghibur walau dipenuhi waktu latihan yang super padat. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama 4,5 tahun berkuliah di Unpar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian.....	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
<i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> SEBAGAI REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	23
2.1 Sejarah dan Profil <i>World Trade Organization</i>	23
2.1.1 Sejarah Terbentuknya <i>World Trade Organization</i>	23

2.1.2 Profil <i>World Trade Organization</i>	28
2.2 Perjanjian-perjanjian dalam <i>World Trade Organization</i>	34
2.3 Penyelesaian Sengketa dalam WTO.....	36
2.3.1 Sengketa Perdagangan yang diselesaikan di WTO.....	42
2.4 <i>World Trade Organization</i> sebagai Rezim Perdagangan Internasional	44
BAB III	49
DINAMIKA PERDAGANGAN BAHAN BAKU OTOMOTIF INDIA DAN TIONGKOK.....	49
3.1 Sejarah dan Kondisi Industri Otomotif di India	49
3.2 Sejarah dan Kondisi Industri Otomotif di Tiongkok.....	53
3.3 Tiongkok sebagai Pengekspor Bahan Baku Otomotif	56
3.3.1 Kerjasama Perdagangan Tiongkok dengan Berbagai Negara.....	57
3.3.2 Kerjasama Perdagangan Tiongkok dengan India	60
3.4 Konflik Perdagangan Bahan Baku Otomotif India dan Tiongkok	62
3.4.1 Pro-Kontra Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif oleh Tiongkok	64
BAB IV	67
PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERDAGANGAN BAHAN BAKU OTOMOTIF INDIA – TIONGKOK	67
4.1 Pengangkatan Sengketa Perdagangan ke WTO	67
4.1.1 Rangkaian Proses Panel dan Banding.....	69
4.1.2 Hasil Keputusan Dispute Settlement Body	72
4.2 Pelajaran yang didapat dari WTO sebagai Rezim Perdagangan Internasional	74
4.2.1 Rezim WTO sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	74
4.2.2 WTO dalam Perspektif Perdagangan Bebas	78
4.3 Epilog	81
BAB V.....	84
KESIMPULAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Putaran dalam GATT	26
Tabel 2.2: Skema Teknis Penanganan Kasus di DSB	41
Tabel 4.1: Kronologi Singkat Penyelesaian Sengketa India Tiongkok dalam DSB	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi di WTO	31
Gambar 3.1: Persentase Impor Bahan Baku Otomotif oleh India	61

DAFTAR SINGKATAN

ACMA	: <i>Automotive Component Manufacturers Association</i>
BUMN	: <i>Badan Usaha Milik Negara</i>
DGAD	: <i>Directorate of Anti-Dumping & Allied Duties</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute Settlement Understanding</i>
GATS	: <i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Bruto</i>
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
JSW	: <i>Jindal South West</i>
MFN	: <i>Most Favoured Nation</i>
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 yang berisi dari pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, terakhir merupakan sistematika pembahasan.

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai Hubungan Internasional menjadi ilmu yang semakin berkembang semenjak perang dunia kedua. Pada awal perkembangannya, fokus studi ini terletak pada ketahanan dan keamanan sebuah negara yang terlihat dari national interest atau kepentingan negara yang hanya sebatas kepentingan politik yaitu, untuk meningkatkan kuasa, kekuatan dan keamanan negara melalui kekuatan militer. Namun, semenjak berakhirnya Perang Dingin, fokus studi ini semakin kompleks dan tidak hanya membahas isu klasik seperti keamanan dan militer, namun studi ini juga membahas isu yang juga berpengaruh pada kestabilan dan kesejahteraan sebuah negara seperti ekonomi politik, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain sebagainya.

Keberagaman isu yang terdapat dalam sebuah studi Ilmu Hubungan Internasional mengakibatkan semakin beragamnya perspektif dalam melihat sebuah fenomena hubungan internasional dan beragamnya aktor yang terlibat dalam studi ini. Hal ini juga memaksa para sarjana dan pengambil keputusan lebih

memperhatikan aspek pada masalah-masalah selain isu tradisional, salah satunya masalah ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya pergerakan hubungan antar negara pada saat itu, negara-negara mulai berani untuk membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Negara-negara mulai melakukan perdagangan baik secara bilateral sampai dengan multilateral. Saat itu, negara mulai menyadari adanya spesialisasi perdagangan namun belum adanya perdagangan yang bebas karena masih adanya keterbatasan dalam perdagangan karena adanya aturan yang terlalu tertutup dan mempersulit jalannya perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan munculnya konflik perdagangan antar negara. Konflik perdagangan antar negara berkaitan dengan perdagangan tetap ada, namun pada saat itu belum adanya badan atau organisasi internasional yang diakui dan memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur.

Permasalahan politik ekonomi ini berpengaruh bagi negara di dunia, contohnya terlihat dari dominasi dan power Amerika Serikat (AS) yang berpengaruh kepada ekonomi setiap negara saat krisis harga minyak dunia akibat embargo OPEC 1973, hingga bencana Perang Vietnam dalam gejolak ekonomi domestik yang telah mengikis hegemoni AS. Saat itu, permasalahan ekonomi AS tampak menjadi kendala dan hambatan bagi kebijakan domestik maupun luar negeri AS¹.

Setiap negara menyadari pentingnya membangun stabilitas ekonomi melalui kebijakan dan melakukan perdagangan internasional guna menjaga

¹ Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

stabilitas keamanan negara. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara negara di dunia karena neraca pembayaran setiap negara sangat rentan terhadap sejumlah besar guncangan dan gangguan².

Pada tahun 1995 secara resmi didirikan *World Trade Organization* (WTO) di Genewa sebagai pengganti dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Perbedaan dari kedua ini adalah GATT merupakan perjanjian yang disetujui dan diratifikasi oleh negara yang menyetujuinya dan WTO merupakan sebuah organisasi. Dalam organisasi terdapat struktur dan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat berjalan secara sempurna berbeda dengan GATT yang merupakan daftar dari aturan perdagangan. Tujuan dari GATT dan WTO sama yaitu untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dapat menjalankan perdagangan mereka dengan baik dan lebih bebas dengan hambatan yang lebih sedikit³.

Namun, setelah WTO mengganti GATT sebagai organisasi internasional, GATT masih ada dan berperan sebagai kebijakan pelindung untuk perdagangan. Dan hasil dari perjanjian GATT 1947 masih terdapat dalam GATT 1994, namun untuk mempermudah, GATT dapat digunakan⁴.

Setiap negara menghadapi dilemma dalam menerapkan kebijakan proteksi atau perdagangan bebas dalam negaranya. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat adanya pertimbangan tertentu seperti meningkatkan dan melindungi

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ WTO, "Understanding the WTO", diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, pada 18 Oktober 2017.

⁴ *Ibid.*

industri domestik.⁵ Namun, terkadang negara juga harus memenuhi kebutuhannya melalui impor dan untuk menjual produknya ke luar, ia harus melakukan perdagangan bebas. Oleh karena itu, negara yang menandatangani kesepakatan GATT 1994 dan negara yang tergabung dalam WTO diharapkan untuk mengimplementasikan perjanjian yang ada. kan pelanggaran dari apa yang tertulis di GATT.

1.2 Identifikasi Masalah

Industri otomotif India merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Industri ini menyumbang 7,1% dari *Gross Domestic Product* (GDP) di India. Produksi kendaraan roda dua sendiri menduduki posisi tinggi dalam pangsa pasar di India, menduduki sekitar 81% dari industri otomotif, ditambah karena berkembangnya penduduk kelas menengah dan penduduk usia muda. Selain itu, meningkatnya minat dari perusahaan di India dalam mengeksplorasi pasar di daerah pedesaan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan di sektor otomotif.

Namun demikian, permintaan pasar yang tinggi akan produksi kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku yang dapat dihasilkan di India sehingga menyebabkan harga bahan baku seperti besi menjadi tinggi. Oleh karena itu, perusahaan India melakukan impor dari negara yang dianggap memenuhi kebutuhan India akan bahan baku produk otomotifnya.⁶

⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 58.

⁶ PTI, "India Probes Dumping Steel Products from China", *The Economic Times*, Juli 2016, diakses dari <http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-probes-dumping-of-steel-products-from-china-eu/articleshow/53059168.cms> pada 20 Oktober 2017.

Tiongkok sebagai negara ekonomi besar di Asia dan memiliki perbatasan darat langsung dengan India menjadi pilihan perusahaan otomotif India yaitu JSW *Steel Coated Products* untuk memperoleh bahan bakunya.⁷ Namun, seiring berjalannya waktu, India merasa dirugikan atas kerjasama perdagangan dengan Tiongkok, dimana Tiongkok dianggap telah melakukan praktik dumping.

Kedua negara sebagai anggota dari *World Trade Organization* (WTO) memutuskan untuk mengangkat kasus ini ke *Dispute Settlement Body*. Adapun ketentuan dumping yang telah diatur dalam Annex IA. Pengertian dumping diatur dalam pasal 2 paragraf 2.1 yaitu suatu produk dianggap dumping, ketika diperkenalkan (dijual) dalam perdagangan di negara lain yang kurang dari nominalnya.

Pengertian dumping menurut kamus ekonomi diartikan sebagai praktik dalam perdagangan yang dilakukan oleh pihak eksportir dengan menjual produk di pasar negara lain dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negaranya sendiri atau di pasaran internasional. Pada umumnya, praktik ini dianggap tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen di negara pengimpor.

Dalam kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu sengketa antara Tiongkok dan India terkait masalah Tiongkok yang dituduh melakukan praktik dumping, India menganggap pihaknya mengalami kerugian (*injury*) yang diakibatkan oleh Tiongkok. Penyelesaian secara bilateral melalui negosiasi telah

⁷ *Ibid.*

dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga kasusnya diangkat ke *Dispute Settlement Body* di WTO.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan membahas **Sengketa Perdagangan Bahan Baku Otomotif Tiongkok-India dalam kerangka World Trade Organization**. Pada sub-bahasan ini penulis akan membatasi isu perdagangan ini dari tahun **2010** sampai dengan **2015**. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi sampai dengan dua aktor, yaitu Tiongkok dan India. Pembatasan melibatkan WTO sebagai organisasi yang menyelesaikan permasalahan dalam perdagangan karena WTO adalah aktor utama dalam penyelesaian sengketa dumping.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah yang telah ada, maka penulis akan merumuskan masalah kedalam suatu bentuk pertanyaan penelitian, yaitu : **“Bagaimana Penyelesaian Sengketa Dumping Bahan Baku Otomotif yang diekspor Tiongkok ke India dalam Kerangka WTO?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi yang bergerak dalam regulasi perdagangan internasional berkontribusi dalam penyelesaian sengketa dumping perdagangan bahan baku otomotif yang terjadi antara Tiongkok dengan India pada periode 2010-2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam membantu menjelaskan bagaimana *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi yang bergerak dalam regulasi perdagangan internasional berkontribusi dalam penyelesaian sengketa dumping antara dua negara. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam menjelaskan masalah perdagangan yang terjadi antara Tiongkok dan India, penulis menggunakan tiga sumber literatur yang dijadikan dasar dalam memberikan pandangan dalam isu yang terjadi.

***Antidumping Law and Practice: An Indian Perspective* oleh Aradhna Aggarwal⁸**

Pada literatur ini, penulis membahas mengenai bagaimana ketentuan yang ada dalam GATT diperlakukan dalam isu perdagangan Tiongkok dan India melalui dua perspektif, hukum dan ekonomi. Penulis literatur ini adalah dua orang dengan latar belakang hukum dan ekonomi. Literatur ini menganalisis mengenai angka dan permasalahan hukum yang dibahas oleh *Appellate Body Report* dan mengangkat kasus impor dari Tiongkok sebagai contoh kasus.

Penulis literatur ini memfokuskan penelitian ke interpretasi *Appellate Body* dalam implementasi komponen GATT di pasal III:4 “pelayanan kurang

⁸ Aradhna Aggarwal, *Antidumping Law and Practice: An Indian Perspective*, Indian Council for Research on International Economic Relations, 2002.

baik” dalam kasus ini atau kasus lain yang sama. Dari perspektif ekonomi, kasus ini dapat diselesaikan secara langsung apabila melanggar GATT ini. Namun dalam konteks analisis pasar yang lebih luas, aturan ini tidak akan berjalan dengan sempurna karena adanya kompetisi. Sehingga, penulis merasa kaitannya dengan yang terjadi pada kasus Tiongkok-India. WTO seharusnya lebih menggunakan aturan yang lebih objektif, yaitu melalui penggunaan metode baru dalam rumus dalam menghitung pajak.

Dalam literatur ini lebih memfokuskan analisa pada bagaimana sebuah kebijakan internasional dengan menggunakan perspektif ekonomi dan hukum. Serta pemberian saran dalam pemberlakuan kebijakan karena sistem kebijakan memiliki kekuatan hukum. Hal ini berbeda dengan yang akan diteliti dalam penelitian isu perdagangan Tiongkok-India dari sudut perdagangan bebas. Karena sudut pandang yang akan digunakan adalah sudut pandang perdagangan bebas, bukan sudut pandang ekonomi dan hukum yang lebih makro. Serta dalam penelitian isu perdagangan Tiongkok-India, penulis tidak memberikan saran dan lebih meneliti bagaimana seharusnya perdagangan pada dua negara terjadi.

***Revealed Comparative Advantage: An Analysis for India and China* oleh Amita Batra dan Zeba Khan⁹**

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perkembangan ekonomi dalam perdagangan bahan baku industri di negara negara besar di Asia. Dalam jurnal ini

⁹ Amita Batra dan Zeba Khan, “Revealed Comparative Advantage: An Analysis for India and China”, *ICRIER*, Agustus 2005, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Zeba_Khan16/publication/286301574_Revealed_Comparative_Advantage_An_Analysis_for_India_and_China/links/5667ab5008ae34c89a025e37.pdf, pada 5 Agustus 2017.

membahas juga hubungan perdagangan bahan baku otomotif antara negara-negara dalam kawasan tersebut, termasuk Tiongkok dan India sebagai negara konsumen dan produsen produk otomotif.

Jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana produktivitas produksi bahan baku industri dalam masing-masing negara di kawasan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai teknologi dalam hubungannya tingkat keuntungan yang dihasilkan. Jurnal ini membahas mengenai teknis produksi dalam negara di kawasan Asia. Kemudian, bagaimana posisi Asia dalam ekonomi industri internasional. Dan, jurnal ini membahas mengenai perkembangan teknologi produksi di masing masing negara.

Terdapat pernyataan mengenai bukan produktivitas sumber daya alam yang berpengaruh, namun produktivitas pekerja yang berpengaruh dalam *comparative advantage* dalam produksi bahan baku industri. *Comparative advantage* muncul dari pemahaman akan perdagangan bebas. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih membahas perdagangan bebas secara luas dengan perbandingan proteksionisme. Dalam jurnal ini tidak membahas proteksionisme, namun lebih membahas mengenai kaitannya dengan produktivitas dan keuntungan komparatif. Dan, wilayah yang dibahas berbeda, jurnal ini lebih membahas hubungan negara-negara dalam satu regional yang kemudian dibandingkan dengan regional lain. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang lebih membahas mengenai hubungan bilateral dua negara.

***Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises* oleh
Timothy A. Falade Obalade¹⁰**

Jurnal ini membahas praktik dumping sebagai salah satu praktik perdagangan yang tidak adil yang dilakukan beberapa negara di dunia sehingga menjadi isu penting khususnya selama dua dekade terakhir. Jurnal ini juga melihat dumping sebagai "senjata pilihan perdagangan" yang diadopsi oleh banyak Negara dan menunjukkan bahwa praktik dumping yang semakin meningkat berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang luas antara negara kaya dan negara-negara miskin dan berkembang. Kesenjangan yang terbentuk ini tentunya memiliki banyak konsekuensi buruk pada negara-negara berkembang.

Dalam memahami konsep dumping lebih lanjut, jurnal ini membahas berbagai jenis praktik dumping yaitu: (1) *Predatory dumping*, merupakan praktik dumping yang paling tidak etis, dimana satu perusahaan mengambil alih pasar di negara tertentu dengan cara menjual barang dengan harga jauh lebih murah, mendominasi pasar, lalu menaikkan harga barang; (2) *Cyclical dumping*, yaitu praktik dumping yang dilakukan suatu negara ketika keadaan ekonomi negara tersebut sedang mengalami resesi, sehingga harga dan kualitas barang rendah, jika barang dengan harga rendah tersebut diekspor, maka akan menjadi praktik dumping yang terjadi dalam siklus tertentu; (3) *Seasonal dumping*, adalah praktik dumping dengan menjual produk yang bersifat musiman seperti pakaian, sepatu, payung yang notabene dijual oleh pesaing lain dengan harga tinggi di musim tertentu, dan (4) *Persistent dumping*, jenis ini dianggap sebagai jenis dumping terburuk dan

¹⁰ Timothy A. Falade Obalade, "Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises", *International Journal of Humanities and Social Science*, 2014, diakses dari http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_5_March_2014/25.pdf, pada 20 November 2017

berbahaya. Praktik ini cenderung dilakukan terus menerus oleh perusahaan monopolistik dalam negeri untuk memaksimalkan keuntungan total dengan menjual komoditasnya dengan harga lebih tinggi di pasar domestik daripada pasar internasional agar dapat bersaing di pasar luar negeri.¹¹ Dari semua penjelasan mengenai jenis dumping terdapat benang merah bahwa dalam bentuk apapun, praktik dumping adalah menjual barang kurang dari nilai wajar atau kurang dari biaya pembuatan barang atau produk. Selain itu, mengacu pada kesepakatan WTO, dumping merupakan praktik perdagangan yang melanggar aturan jika itu dilakukan dengan tujuan mengusir pesaing keluar dari pasar.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun untuk membantu memahami masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dan relevan dengan obyek penelitian yang diteliti. Penulis menggunakan beberapa pendekatan, teori, dan konsep untuk menjelaskan permasalahan ini.

Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah pendekatan sub-disiplin yang cenderung baru dalam Ilmu Hubungan Internasional, sub-disiplin ini baru hadir secara signifikan pada awal dekade 1970an. Terdapat banyak definisi dan pendapat mengenai apa itu ekonomi politik internasional. Namun, pada dasarnya studi ini tidak lepas dari status sebagai studi interdisipliner yang memiliki pemahaman tunggal bahwa EPI menyangkut kait mengait antara politik

¹¹ Timothy A. Falade Obalade, "Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises", *International Journal of Humanities and Social Science*, 2014, diakses dari http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_5_March_2014/25.pdf, pada 20 November 2017.

dan ekonomi, Fokus perhatiannya terletak pada bagaimana kekuatan-kekuatan politik (negara, lembaga, pelaku individual, dan lain sebagainya) membentuk atau memengaruhi interaksi politik dan sebaliknya, bagaimana efek dari interaksi ekonomi terhadap struktur atau proses politik.¹² Dalam sub-disiplin ini terdapat beberapa klasifikasi yang akan digunakan dalam meneliti obyek yang diteliti, yaitu aliran merkantilis dan aliran liberalis.

Neoliberalisme merupakan teori yang berkembang pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Paham ini meyakini bahwa kompetisi diantara negara berdaulat dalam dunia anarki akan menciptakan konflik. Namun, dalam neoliberal meyakini sebuah sistem ditandai dengan complex interdependence (ketergantungan yang kompleks atau rumit). Yang dimaksud adalah negara terikat melalui banyak faktor seperti perdagangan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Hal ini dipandang mampu untuk membatasi konflik. Complex interdependence juga menggunakan hukum internasional dan pembuatan organisasi internasional yang semakin banyak dan kuat. Dengan adanya complex interdependence tidak akan menghilangkan konflik, namun mampu mengurangi konflik.¹³

Liberalisasi perdagangan merupakan sebuah bentuk perdagangan dimana negara sudah mulai membuka hubungannya. Negara berdagang satu sama lain karena perdagangan membuat keadaan negara lebih

¹² Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

¹³ John T. Rourke, *International Politics on the World Stage*, McGraw Hill, New York, 2009, hlm. 24.

baik. Dalam perdagangan internasional, persaingan terjadi pada tingkat perusahaan, dan berpengaruh pada perekonomian negara dilihat dari kesejahteraan warga negaranya. Warga negara dari setiap negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas dengan menikmati beragam barang dan jasa yang umumnya dengan biaya lebih rendah. Sebuah negara yang memutuskan untuk mengisolasi dirinya secara ekonomi dari negara-negara lain di dunia akan mengalami hambatan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya, khususnya kebutuhan pokok.¹⁴ Agar bisa bertahan, negara tersebut perlu memproduksi makanan sendiri, membuat sendiri pakaian dan memperoleh bahan untuk membangun rumah sendiri. Namun, jika negara ini memutuskan untuk membuka perbatasannya untuk berdagang, masyarakat tidak perlu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, dan dapat lebih fokus pada kegiatan perekonomian lain untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga, dapat dilihat bahwa liberalisasi perdagangan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, dan standar kehidupan yang lebih baik bagi negara.

Dalam sistem perdagangan internasional, negara yang melakukan liberalisasi cenderung lebih intensif dalam pertukaran informasi, terutama dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan perdagangan. Walaupun disebut sebagai kebebasan dalam perdagangan, namun tuntutan untuk mematuhi berbagai ketentuan tetap perlu dijalankan oleh setiap negara. Salah satu faktor utama yang membuat setiap negara, dimana negara saling bergantung satu sama lain di dalam perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, setiap negara merasakan

¹⁴ David Dollar dan Aart Kraay, "Trade, Growth, and Poverty", *International Monetary Fund*, diakses dari <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm>, pada 20 Desember 2017.

kewajiban yang besar untuk berpartisipasi di dalam berbagai proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁵

***Free Trade* atau perdagangan bebas** muncul dari teori liberalisme. Dimana pada saat difokuskan pada perdagangan, liberalisme muncul dengan memusatkan perdagangan pada skala liberalisasi perdagangan. Dimana pada perdagangan bebas memusatkan konsep pada perdagangan tidak memiliki aturan yang terlalu kuat dan produksi produk dapat dilakukan dimana ia dapat diselesaikan secara efisien dan semua negara akan mendapatkan keuntungan.¹⁶ Ekspansi perekonomian dunia tidak akan pernah terjadi apabila kepentingan politis terus menerus berada di atas mekanisme pasar. Kemakmuran tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan suatu negara untuk menumpuk emas, perak, dan barang berharga lainnya, tetapi merupakan suatu hasil dari tindakan berproduksi dan bertransaksi secara bebas yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya. Dalam kasus negara, perdagangan bebas harus juga mampu menguntungkan dalam impor dan juga ekspor. Perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistem pembagian kerja internasional yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan.¹⁷

Terlepas dari komitmennya terhadap pasar bebas, perdagangan bebas tetap mentolerir diberlakukannya tarif impor, hanya saja pemberlakuan tarif itu harus

¹⁵ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 36.

¹⁶ Thomas D. Lairson dan David Skidmore, *International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth in a Globalizing World*, Routledge, Abingdon, 2016, hlm. 14.

¹⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

memenuhi sekurang-kurangnya dua persyaratan, (1) jumlah pungutan hendaknya tidak lebih dari pajak/cukai domestik yang diberlakukan bagi para produsen dalam negeri dan (2) pungutan tersebut hanya bersifat sementara, yakni ketika industri di dalam negeri melakukan penyesuaian seperlunya dengan industri-industri sejenis diluar negeri.¹⁸ Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, terdapat enam kualifikasi pengecualian lainnya dari perdagangan bebas, yaitu:

1. Resiprositas

Untuk mencapai keuntungan bagi negara-negara yang melakukan perdagangan, maka harus adanya penambahan keuntungan ekonomi yang didapat dari liberalisasi perdagangan. Hal ini dilakukan melalui mengajak negara yang menjadi *partner* dagang untuk melakukan liberalisasi aturan perdagangan negaranya. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena masing-masing negara memiliki kepentingan negaranya sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis resiprositas yaitu, resiprositas pasif dan resiprositas agresif. Dalam resiprositas pasif negara tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dimiliki sampai negara yang menjadi *partner* dagang setuju untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dimiliki.¹⁹ Kemudian, apabila dua negara telah melakukan negosiasi perdagangan sebelumnya, namun pada saat melakukan negosiasi tersebut tidak diawasi pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa kedua negara tersebut untuk melakukan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Routledge, USA & Canada, 1995, hlm. 6.

kesepakatan yang telah disepakati, maka negara dapat melakukan tindakan balasan apabila kesepakatan yang dimiliki tidak dijalankan.

2. Tarif yang optimal

Disini berbicara mengenai apabila produk barang suatu negara banyak peminatnya, maka pengirim produk tersebut diperbolehkan untuk melakukan manajerisasi produknya secara langsung, dan memiliki kekuatan monopsoni.²⁰ Dimana konsumen akan dapat membeli produk dengan harga yang sama namun keuntungan bagi pemerintah adalah akan dikenakan tariff yang berbeda.

3. Industri yang ada dalam masa pertumbuhan

Dalam perdagangan bebas, tidak memperbolehkan adanya hambatan atau tariff yang tinggi. Namun, dalam kasus industri manufaktur yang masih dalam masa pertumbuhan, diperkenankan untuk memiliki atau memberikan tariff yang disebut tariff perlindungan.²¹ Tarif perlindungan cenderung tinggi dan diberlakukan dalam jangka waktu yang rendah.

4. Teori perdagangan yang strategis

Teori ini berbicara mengenai bagaimana terdapat indurstri domestik tertentu yang mendapat perlakuan khusus dalam melaksanakan perdagangannya.

²⁰ Monopsoni merupakan situasi pasar dimana hanya terdapat satu pembeli.

²¹ Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Routledge, USA & Canada, 1995, hlm. 9.

Yaitu diberikannya subsidi dalam penelitian dan pengembangan, pengadaan aturan yang berkaitan dengan aturan perindustrian.²²

5. Pertimbangan peningkatan pendapatan

Perdagangan bebas juga berpengaruh pada potensi peningkatan pendapatan. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak.²³ Oleh karena itu dalam perdagangan bebas harus melihat dari perspektif pajak dalam melakukan perlindungan.

6. Pertimbangan keamanan nasional

Dalam kaitannya dengan keamanan nasional, negara melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konsep perdagangan bebas. Perdagangan yang dimaksud merupakan perdagangan ekspor maupun impor. Dalam impor, terkadang negara melakukan pembatasan untuk melindungi pasar domestiknya. Dalam kasus ekspor, negara melakukan pembatasan ekspor terhadap barang yang dianggap sensitif seperti barang-barang militer. Sistem pasar bebas dapat berjalan dengan sempurna apabila didukung oleh dua hal, yang pertama adalah sistem pembayaran internasional yang stabil. Kedua pemilihan spesialisasi produksi suatu negara hendaknya ditentukan oleh mekanisme yang disebut dengan istilah *absolute advantage*.²⁴ Dan hanya berlaku pada situasi dimana tingkat upah buruh kedua negara setara.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Organisasi Internasional merupakan perjanjian antara anggota, meskipun perwakilan dari negara atau bukan, dari minimal dua negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama di dalam keanggotaan tersebut.²⁵ Organisasi internasional dapat dikaji melalui tiga hal yaitu melalui keanggotaan, melalui tujuan dan aktifitas, dan melalui struktur. Keanggotaan merupakan pembentukan sebuah kerjasama antar negara yang bersifat mengikat yang dibuat berdasarkan tujuan yang sama dan diwujudkan melalui aktifitas yang ada, dan di dalamnya terdapat struktur yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Dan dalam menjalankan organisasinya, organisasi internasional memiliki peran dan fungsi, yaitu instrumen, arena, dan aktor.

- Instrumen, digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu. Organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen yaitu dimana anggota yang merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional.²⁶ Instrumen juga digunakan negara untuk meningkatkan sasaran kebijakan luar negerinya.

- Arena, sebagai arena organisasi internasional menjadi tempat untuk membahas masalah yang dihadapi oleh anggotanya. Dimana organisasi internasional menjadi fasilitator dan penyedia pertemuan anggotanya untuk membahas permasalahan yang dihadapi, kerjasama, berdiskusi, dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ Clive Archer, *International Organization*, Taylor & Francis e-Library, New York, 2001, hlm 1.

²⁶ *Ibid.*, 68.

²⁷ *Ibid.*, 73.

- Aktor, organisasi internasional harus mampu menjadi aktor. Namun, aktor yang dimaksud adalah aktor yang independen, dimana aktor yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan atau paksaan dari luar negeri.²⁸ Selain itu organisasi internasional juga harus mampu beroperasi sebagai aktor internasional.

Munculnya studi mengenai rezim internasional tidak terlepas dari studi organisasi internasional. Rezim Internasional merupakan sebuah studi yang sudah dikaji berpuluh-puluh tahun. Terdapat banyak definisi yang mendefinisikan rezim, namun yang umum dalam mengartikan rezim internasional adalah teori rezim internasional yang disampaikan oleh Krasner, “prinsip, norma, dan pembuatan keputusan yang secara implisit atau eksplisit yang menjadi cakupan ekspektasi para aktor dalam area hubungan internasional.”²⁹ Prinsip dan norma merupakan dua hal yang penting dalam sebuah rezim, karena dalam prakteknya, prinsip dan norma memegang kendali dalam stabilitas rezim dan perubahannya. Rezim internasional juga merupakan sebuah tempat dimana diaturnya sebuah pengaturan yang dibangun oleh aktor, yaitu melalui pengaturan koordinasi dimana negara-negara mengatur kepentingan pribadi negaranya dalam beberapa aspek isu internasional.³⁰ Dan dalam perkembangannya, isu yang dimiliki dalam sebuah rezim akan berubah seiring dengan berkembangnya isu dalam masyarakat global.

²⁸ *Ibid.*, 79.

²⁹ Eric Brahm, “International Regimes”, *Beyond Intract*, diakses dari <http://www.beyondintractability.org/essay/internationalregimes>, pada 5 September 2017.

³⁰ Fredrich Kratochwill dan Edward D. Mansfield, *International Organization A Reader*, HarperCollins College Publishers, New York, 1994, hlm. 7.

Rezim Internasional merupakan sebuah hal yang penting karena rezim merupakan sebuah wadah yang menyatukan kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor internasional. Seperti yang disampaikan oleh Krasner, terbentuknya sebuah rezim dapat dilakukan secara implisit ataupun eksplisit, namun dalam mengikatnya perlu dilakukan kesepakatan yang dilakukan secara eksplisit.

Dispute Settlement Understanding merupakan pemahaman dalam DSB mengenai bagaimana sebuah *trade dispute* diselesaikan.³¹ *Trade Dispute* merupakan konflik perdagangan antar anggota yang melakukan perdagangan.³² Selain itu penyelesaian sengketa dianggap sebagai pilar utama dari sistem perdagangan multilateral dan merupakan kontribusi yang unik bagi kestabilan ekonomi global. Hal ini ditujukan agar sistem perdagangan yang dijalankan agar lebih aman dan dapat diprediksi. Penyelesaian sengketa dilakukan dibawah DSB yang dilakukan tetap diawasi dan dilindungi oleh WTO melalui perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode yang mengaitkan teori dengan penelitian yang dilakukan, dengan bertujuan untuk dapat dipahami oleh para pembaca secara jelas dan mudah.³³ Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh WTO dalam penyelesaian sengketa dumping antara Tiongkok dan India,

³¹ WTO, "Understanding the WTO: Settling Dispute, A Unique Contribution", diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, pada 8 September 2017.

³² *Ibid.*

³³ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 98.

metode yang digunakan yakni adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang sebagai prosedur penelitian data deskriptif dengan menggunakan pernyataan lisan maupun tulisan dari sejumlah sumber yang dapat di buktikan validitasnya serta perilaku yang dapat di analisa.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut bersumber dari jurnal, buku, teks, internet, literatur serta hasil penelitian yang sebelumnya dipandang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data sekunder memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dengan menyaring data serta informasi yang relevan sehingga dapat mendukung penulisan penelitian ini, melalui studi dokumen. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari buku, berita, jurnal, surat kabar, laporan serta permasalahan yang telah terjadi sebelumnya.³⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis telah merancang hal-hal yang akan ditulis pada serangkaian bab selanjutnya, penelitian ini akan penulis bagi menjadi lima bab. Pada Bab 1 akan memuat pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 56.

Bab 2 akan mengidentifikasi profil dari WTO sebagai organisasi yang memberikan regulasi dalam perdagangan internasional, pada bab ini akan dielaborasi melalui beberapa sub-bab yang menjelaskan profil WTO beserta sejarah dan visi misi, struktur dan keanggotaan dari WTO, serta persetujuan dan perjanjian yang terdapat di dalam WTO.

Bab 3 akan mengulas tentang industri bahan baku otomotif di kedua negara yaitu Tiongkok dan India serta kerjasama perdagangan antara kedua negara di sektor tersebut, pada bab ini akan dimulai dengan penjelasan sub-bab perihal sejarah dan kebijakan terkait mengenai industri bahan baku otomotif di masing-masing negara. Dilanjutkan dengan kerjasama antara kedua negara lalu terakhir penjelasan mengenai persengketaan yang terjadi.

Bab 4 akan menganalisis bagaimana upaya WTO dalam penyelesaian sengketa dumping. Di dalam sub-bab akan dijelaskan bagaimana kasus diangkat ke WTO, peran WTO sebagai rezim perdagangan internasional dalam menyelesaikan kasus, dan terakhir adalah hasil perundingan dari kasus ini.

Bab 5 berisi simpulan dari upaya WTO dalam penyelesaian sengketa dumping antara Tiongkok dan India, dengan merujuk kembali pada perumusan masalah yang terdapat pada Bab 1.